BERITA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

No. 23, 2026BKAD, Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2026

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor xx Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

22. Peraturan . . .

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

33. Peraturan . . .

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 185);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 194, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 149);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor . . . Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026 Nomor . . . , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

1.	Pendapatan:	
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp74.076.588.805,04
	b. Pendapatan Transfer	Rp784.170.028.454,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp00,00
	Jumlah Pendapatan	Rp858.246.617.259,04
2.	Belanja:	
	a. Belanja Operasi:	
	1) Belanja Pegawai	Rp368.113.957.816,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	Rp212.806.240.143,94
	3) Belanja Bunga	Rp2.455.883.912,00
	4) Belanja Hibah	Rp19.740.963.689,00
	5) Belanja Bantuan Sosial	Rp2.010.800.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp605.127.845.560,94

b. belanja . . .

b.	Belanja Modal:	
	1) Belanja Tanah	Rp507.039.600,00
	2) Belanja Peralatan Mesin	Rp10.710.203.293,00
	3) Belanja Bangunan dan Gedung	Rp33.882.072.341,00
	4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp65.474.516.340,00
	5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp4.583.535.768,00
	6) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp2.010.800.000,00
	Jumlah Belanja Modal	Rp115.157.367.342,00
c.	Belanja Tidak Terduga:	
	Belanja Tidak Terduga	Rp147.115.100,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp147.115.100,00
d.	Belanja Transfer:	
	1) Belanja Bagi Hasil	Rp7.516.216.090,00
	2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp136.235.661.299,00
	Jumlah Belanja Transfer	Rp143.751.877.389,00
	Jumlah Belanja	Rp864.184.205.391,94
	Defisit	(Rp5.937.588.132,90)
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp26.351.911.703,99
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp12.466.058.328,00
	Jumlah Pembiayan Netto	Rp13.885.853.375,99
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp7.948.265.243,09

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Agustus 2026

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Ttd.

IWAN MURSALIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2026 NOMOR: 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**933.226.772.159,43**	**858.246.617.259,04**	**91,96**	**919.969.246.990,91**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**76.108.586.472,43**	**74.076.588.805,04**	**97,33**	**54.654.930.261,91**
4.1.01	Pajak Daerah	46.019.771.073,00	45.314.866.135,60	98,46	28.287.524.975,16
4.1.02	Retribusi Daerah	10.789.351.409,00	9.924.050.721,29	91,98	7.644.273.485,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.739.893.790,00	1.946.157.198,74	111,85	2.573.282.539,84
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.559.570.200,43	16.891.514.749,41	96,19	16.149.849.261,91
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**76.108.586.472,43**	**74.076.588.805,04**	**97,33**	**54.654.930.261,91**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**857.118.185.687,00**	**784.170.028.454,00**	**91,48**	**865.314.316.729,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	736.687.589.189,00	740.692.704.063,00	100,54	777.831.718.927,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.430.596.498,00	43.477.324.391,00	36,10	87.482.597.802,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**120.430.596.498,00**	**43.477.324.391,00**	**36,10**	**87.482.597.802,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**857.118.185.687,00**	**784.170.028.454,00**	**91,48**	**865.314.316.729,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**933.226.772.159,43**	**858.246.617.259,04**	**91,96**	**919.969.246.990,91**
5	**BELANJA DAERAH**	**946.796.808.464,63**	**864.184.205.391,94**	**91,27**	**897.699.890.533,62**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**640.106.250.935,63**	**605.127.845.560,94**	**94,53**	**627.740.608.621,62**
5.1.01	Belanja Pegawai	377.499.741.042,63	368.113.957.816,00	97,51	360.357.063.424,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.243.915.629,00	212.806.240.143,94	90,46	217.770.858.198,62
5.1.03	Belanja Bunga	2.500.000.000,00	2.455.883.912,00	98,23	2.557.279.677,00
5.1.05	Belanja Hibah	22.848.594.264,00	19.740.963.689,00	86,39	45.037.407.322,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.014.000.000,00	2.010.800.000,00	99,84	2.018.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**640.106.250.935,63**	**605.127.845.560,94**	**94,53**	**627.740.608.621,62**
5.2	**BELANJA MODAL**	**138.785.157.494,00**	**115.157.367.342,00**	**82,97**	**130.847.881.637,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	568.300.000,00	507.039.600,00	89,22	1.574.327.250,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.676.217.624,00	10.710.203.293,00	91,72	19.481.348.497,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.859.081.998,00	33.882.072.341,00	80,94	42.346.630.969,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.988.540.454,00	65.474.516.340,00	81,85	63.231.060.671,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.593.017.418,00	4.583.535.768,00	99,79	4.214.514.250,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**138.785.157.494,00**	**115.157.367.342,00**	**82,97**	**130.847.881.637,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**200.000.000,00**	**147.115.100,00**	**73,55**	**246.620.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	147.115.100,00	73,55	246.620.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**200.000.000,00**	**147.115.100,00**	**73,55**	**246.620.000,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**167.705.400.035,00**	**143.751.877.389,00**	**85,71**	**138.864.780.275,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.626.988.737,00	7.516.216.090,00	45,20	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	151.078.411.298,00	136.235.661.299,00	90,17	138.864.780.275,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**167.705.400.035,00**	**143.751.877.389,00**	**85,71**	**138.864.780.275,00**
	JUMLAH BELANJA	**946.796.808.464,63**	**864.184.205.391,94**	**91,27**	**897.699.890.533,62**
	SURPLUS/DEFISIT	**(13.570.036.305,20)**	**(5.937.588.132,90)**	**43,75**	**22.269.356.457,29**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**13.570.036.305,20**	**13.885.853.375,99**	**102,32**	**3.150.158.847,91**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**26.070.036.305,20**	**26.351.911.703,99**	**101,08**	**15.616.217.175,91**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.419.515.305,20	25.406.690.703,99	99,94	15.316.217.175,91
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	650.521.000,00	945.221.000,00	145,30	300.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**26.070.036.305,20**	**26.351.911.703,99**	**101,08**	**15.616.217.175,91**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**12.500.000.000,00**	**12.466.058.328,00**	**99,72**	**12.466.058.328,00**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.500.000.000,00	12.466.058.328,00	99,72	12.466.058.328,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**12.500.000.000,00**	**12.466.058.328,00**	**99,72**	**12.466.058.328,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**13.570.036.305,20**	**13.885.853.375,99**	**102,32**	**3.150.158.847,91**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**7.948.265.243,09**	**0,00**	**25.419.515.305,20**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Ttd.

NOVRIWAN JAYA